

**TESIS**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM  
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS KLINIK GIGI DAN  
DOKTER GIGI PRAKTIK MANDIRI**



**PASCALIN FIESTARIKA INDRASWARI**

**17.C2.0003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
KONSENTRASI HUKUM KESEHATAN  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2020**

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM  
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS KLINIK GIGI DAN  
DOKTER GIGI PRAKTIK MANDIRI**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh :

Pascalin Fiestarika Indraswari

NIM : 17.C2.0003

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2020**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pascalin Fiestarika Indraswari

NIM : 17.C2.0003

Progdi / Konsentrasi : Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan

Fakultas : Fakultas Hukum Dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan Judul **Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengelolaan Limbah Medis Klinik Gigi Dan Dokter Gigi Praktik Mandiri** tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 26 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Pascalin Fiestarika Indraswari

## HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG DALAM  
PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS KLINIK GIGI DAN DOKTER GIGI  
PRAKTIK MANDIRI

Diajukan oleh : Pascalin Fiestatika1

NIM : 17.C2.0003

Tanggal disetujui : 26 Oktober 2020

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : dr. C. Tjahjono Kuntjoro Ph.D

Pembimbing 2 : Yovita Indrayati S.H., M.Hum.

Penguji 1 : dr. C. Tjahjono Kuntjoro Ph.D

Penguji 2 : Yovita Indrayati S.H., M.Hum.

Penguji 3 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Sunandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi?id=17.C2.0003](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi?id=17.C2.0003)

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pascalin Fiestarika Indraswari

Program Studi : Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan

Fakultas : Fakultas Hukum Dan Komunikasi

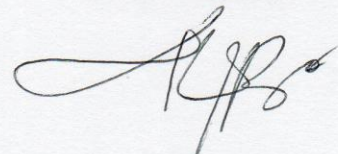
Jenis Karya : Tesis

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengelolaan Limbah Medis Klinik Gigi Dan Dokter Gigi Praktik Mandiri** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 26 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Pascalin Fiestarika Indraswari

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas penyertaan dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Medis Klinik Gigi dan Dokter Gigi Praktik Mandiri.

Masyarakat khususnya warga Kota Semarang mulai menyadari akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Apalagi pelayanan kesgilut sudah masuk sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional. Oleh karena meningkatnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan tersebut, maka memicu peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) gigi mulut seperti klinik gigi dan dokter gigi praktik mandiri di kota Semarang.

Peningkatan jumlah fasyankes berdampak pada meningkatnya produksi limbah medis dan akhirnya menimbulkan permasalahan baru pada aspek lingkungan hidup. Pengaturan pengelolaan limbah medis tersebut sesungguhnya merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang. Oleh karena itu, peneliti ingin melihat sejauh mana peran Pemerintah Kota Semarang dalam mengatur kebijakan mengenai pengelolaan limbah medis pelayanan kesehatan gigi mulut di klinik gigi dan dokter gigi praktik mandiri.

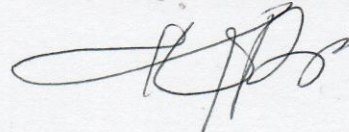
Tesis ini disusun sebagai syarat kelulusan program strata dua magister hukum kesehatan di Universitas Katolik Soegijapranata. Peneliti selama berproses mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Peneliti ingin berterima kasih kepada:

1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS. IEC selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranatana
2. Dr. Marsela Elwina, S.H, CN selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata
3. Dr. Endang Wahyati Y., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus penguji yang telah banyak memberi masukan dalam penyempurnaan tesis ini.
4. Dr. C. Tjahjono Kuntjoro, PhD selaku pembimbing I yang telah membimbing penyusunan tesis ini.
5. Yovita Indrajati, SH., M. Hum selaku pembimbing II yang telah membimbing penyusunan tesis ini.
6. Seluruh dosen Prodi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata yang telah memberikan materi pembelajaran selama perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh staf Prodi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata yang telah membantu dalam hal korespondensi dan koordinasi untuk kepentingan penelitian selama penyusunan tesis ini.
8. Seluruh staf perpustakaan Unika Soegijapranata yang telah membantu peneliti menemukan sumber pustaka penelitian.
9. Suami, Stefanus Satria Adi Dharma yang senantiasa bersedia membantu di setiap kesulitan penulis selama penyusunan tesis ini.
10. Anak-anak, Maximiliano Aditya Gurna dan Lucia Aryakirana Sukshma yang selalu menjadi booster penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.

11. Orangtua, Bapak Robertus Basiya dan Mama MC Henny Nur Ediwati yang turut mendukung pendidikan penulis.
12. Adik, drg Claudia Twistasari yang telah membantu memberi banyak ide dan menjadi mata kedua memeriksa *typo* dalam tesis ini.
13. Sahabat jauh drg Finsa Tisna Sari, M. Biomed dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada yang senantiasa membantu penulis dalam menemukan sumber penelitian.
14. Tante tercinta sekaligus mantan pembimbing S1 penulis, Dr. drg. Alma Linggar Jonarta, M.Kes yang sudah memberikan banyak saran perihal kehidupan menempuh S2 sembari bekerja, mengurus suami yang juga sedang masa pendidikan, dan mengurus anak-anak.
15. Teman-teman mahasiswa hukum kesehatan angkatan XXVII yang juga memberi semangat selama penyusunan tesis ini
16. Semua pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan tesis ini dan tidak dapat disebutkan satu per satu.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih kurang sempurna. Maka, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang obyektif terhadap penelitian ini. Semoga tesis ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 26 Oktober 2020



Pascaline Fiestarika Indraswari



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	xvi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	xix
<b>ABSTRAK</b> .....	xx
<b>ABSTRACT</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. LATAR BELAKANG MASALAH</b> .....	1
<b>B. PERUMUSAN MASALAH</b> .....	12
<b>C. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	12
<b>D. MANFAAT PENELITIAN</b> .....	13

1. Manfaat Akademis .....	13
2. Manfaat Praktis .....	13
a. Bagi Penulis .....	13
b. Bagi Pemerintah .....	14
c. Bagi Masyarakat .....	14
<b>E. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>14</b>
1. Metode pendekatan .....	14
2. Spesifikasi penelitian .....	15
3. Jenis data .....	15
a. Data Primer .....	16
b. Data Sekunder .....	16
1) Bahan Hukum primer .....	16
2) Bahan Hukum sekunder .....	20
3) Bahan Hukum Tersier .....	20
4. Metode Pengumpulan Data .....	20
a. Studi Pustaka .....	20
b. Studi Lapangan .....	21
1) Observasi .....	21
2) Wawancara .....	22
5. Metode Sampling .....	23
6. Metode Analisis Data .....	24
<b>F. PENYAJIAN TESIS .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>

<b>A. PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH.....</b>	<b>27</b>
<b>B. TUGAS PEMERINTAH DALAM NEGARA HUKUM .....</b>	<b>29</b>
<b>C. KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>33</b>
<b>D. KEBIJAKAN .....</b>	<b>37</b>
<b>E. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS .....</b>	<b>46</b>
<b>F. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (FASYANKES).....</b>	<b>58</b>
<b>G. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT.....</b>	<b>60</b>
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
<b>A. HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
1. Gambaran Umum Obyek penelitian.....	62
a. Jumlah Klinik dan Dokter Gigi Praktik Mandiri di Kota Semarang.....	62
b. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Semarang .....	64
2. Hasil wawancara .....	68
a. Narasumber.....	68
1) Narasumber Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang .....	68
a) Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 .....	68
b) Seksi Limbah Cair .....	74
c) Seksi Pengawasan.....	76
d) Seksi Sengketa Lingkungan dan Aduan Masyarakat .	78
2) Narasumber Dinas Kesehatan Kota Semarang.....	80

a)	Seksi Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan	80
b)	Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) .....	82
c)	Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes).....	84
b.	Responden penelitian .....	87
1)	Klinik .....	87
a)	Klinik A .....	87
b)	Klinik B .....	91
c)	Klinik C .....	96
2)	Dokter Gigi Praktik Mandiri.....	99
a)	Dokter gigi 1 .....	99
b)	Dokter gigi 2 .....	102
c)	Dokter gigi 3 .....	105
d)	Dokter gigi 4 .....	108
e)	Dokter gigi 5 .....	110
<b>B.</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	113
1.	Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Mengatur Pengelolaan Limbah Medis di Klinik Gigi Dan Dokter Gigi Praktik Mandiri .....	113
a.	Subjek Dalam Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Medis.....	113
b.	Tugas Pemerintah Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Medis.....	114

c. Kewenangan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Medis .....	116
d. Objek Dalam Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam Pengelolaan Limbah Medis di Klinik dan Dokter Gigi Praktik Mandiri.....	118
e. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengelolaan Limbah Medis Di Klinik Gigi Dan Dokter Gigi Praktik Mandiri	124
2. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis di Klinik Gigi dan Dokter Gigi Praktik Mandiri.....	132
a. Penemuan Limbah Medis Yang Dihasilkan Di Klinik Gigi Dan Dokter Gigi Praktik Mandiri.....	132
b. Tahap Pengelolaan Limbah Medis Yang Sudah Dilaksanakan Di Klinik Gigi Dan Dokter Gigi Praktik Mandiri .....	133
1) Pengurangan dan Pemilahan.....	134
2) Penampungan Sementara.....	135
3) Pengangkutan dan Pengolahan.....	137
3. Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengelolaan Limbah Medis di Klinik Gigi dan Dokter Gigi Praktik Mandiri .....	140
a. Faktor yuridis .....	140
b. Faktor sosiologis.....	143

c. Faktor teknis .....	144
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>147</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>147</b>
1. Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Mengatur Pengelolaan Limbah Medis di Klinik Gigi Dan Dokter Gigi Praktik Mandiri .....	147
2. Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis di Klinik Gigi dan Dokter Gigi Praktik Mandiri .....	149
3. Faktor Yang Mendukung Dan Menghambat Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Dalam Pengelolaan Limbah Medis di Klinik Gigi dan Dokter Gigi Praktik Mandiri .....	151
a. Faktor Yuridis.....	151
b. Faktor Sosiologis .....	152
c. Faktor Teknis.....	153
<b>B. Saran.....</b>	<b>153</b>
1. Pemerintah Kota Semarang.....	154
2. Klinik .....	156
3. Dokter Gigi Praktik Mandiri .....	156
4. PDGI Cabang Semarang .....	156
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>158</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>164</b>

## DAFTAR SINGKATAN



AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APD	: Alat Pelindung Diri
BPJS	: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
B3	: Bahan Berbahaya dan Beracun
CHKM	: Chlorfenol Kamfer Menthol
EDTA	: Asam Ethylenediaminetetraacetic
DKK	: Dinas Kesehatan Kota
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DPMPTSP	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
JUKNIS	: Petunjuk Teknis
IPAL	: Instalasi Pengolahan Limbah Cair
FASYANKES	: Fasilitas Pelayanan Kesehatan
KESGILUT	: Kesehatan Gigi dan Mulut
KEPMENKES	: Keputusan Menteri Kesehatan
KLHK	: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
NAKES	: Tenaga Kesehatan
PEMKOT	: Pemerintah Kota
PERDA	: Peraturan Daerah
PERMENKES	: Peraturan Menteri Kesehatan
PERMEN LHK	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PERWAL	: Peraturan Walikota
PP	: Peraturan Pemerintah
SARPRAS	: Sarana Prasarana
SDK	: Sumber Daya Kesehatan
SIP	: Surat Izin Praktik
SPO	: Standar Prosedur Operasional
SPPL	: Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
RS	: Rumah Sakit
TKF	: Trikresolformalin
TPS	: Tempat Penampungan Sementara
UKL-UPL	: Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan
UU	: Undang-Undang
UUPPLH	: Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
YANKES	: Pelayanan Kesehatan

## DAFTAR TABEL

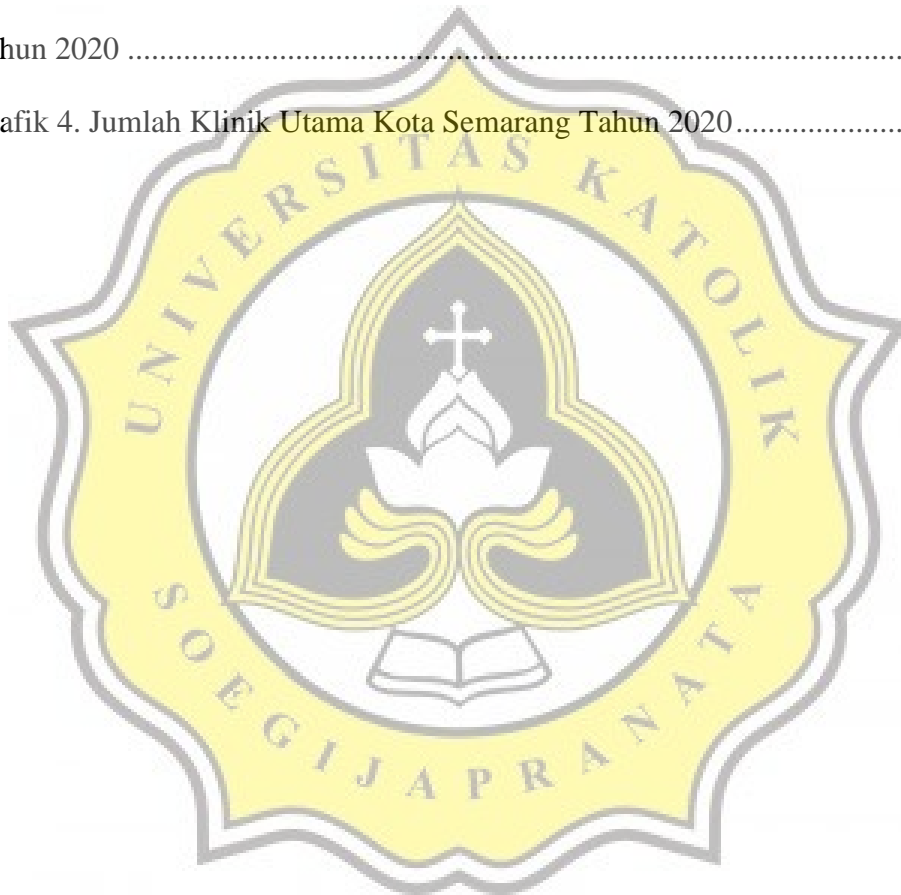
Tabel 1. Perhitungan Besar Sampel Penelitian .....	23
Tabel 2. Daftar Kategori Limbah B3 Fasilitas Pelayanan Kesehatan .....	50
Tabel 3. Parameter Uji Karakteristik Limbah B3 .....	51





## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Data Jumlah Klinik Gigi Dan Dokter Gigi Praktik Mandiri Kota Semarang Tahun 2020.....	62
Grafik 2. Jumlah Klinik Pratama di Kota Semarang.....	63
Grafik 3. Klinik Pratama Non Kecantikan dan MOU dengan BPJS Kesehatan Tahun 2020 .....	63
Grafik 4. Jumlah Klinik Utama Kota Semarang Tahun 2020.....	64



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Lembar Persetujuan Menjadi Narasumber .....	164
Lampiran 2. Panduan Wawancara Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang .....	165
Lampiran 3. Panduan Wawancara Responden Pemilik Klinik dan Dokter Gigi Praktik Mandiri .....	167
Lampiran 4. Daftar Tilik Observasi Pengelolaan Limbah Medis di Klinik dan Dokter Gigi Praktik Mandiri .....	168
Lampiran 5. Izin Penelitian ke Dinas Kesehatan Kota Semarang .....	172
Lampiran 6. Izin Penelitian ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang .....	173
Lampiran 7. Izin Penelitian ke Klinik B .....	174
Lampiran 8. Izin Penelitian ke Klinik C .....	175
Lampiran 9. Alur Pengajuan Izin TPS Limbah B3 DLH Kota Semarang .....	176
Lampiran 10. Prosedur Pengajuan Izin TPS Limbah B3 DLH Kota Semarang .....	177
Lampiran 11. Alur Perizinan DPMPTSP Kota Semarang .....	179
Lampiran 12. Formulir Permohonan SPPL DPMPTSP Kota Semarang .....	180
Lampiran 13. Syarat Administratif Pengurusan SPPL di DPMPTSP .....	187
Lampiran 14. Syarat Administratif Permohonan Izin Klinik dari Dinas Kesehatan Kota Semarang .....	188
Lampiran 15. Syarat Pengurusan SIP PDGI Cabang Semarang .....	189
Lampiran 16. Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup .....	192

Lampiran 17. Lampiran UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan .....195  
Lampiran 18. Hasil *Plagiarism Check* .....198



## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya Pascalin Fiestarika Indraswari, peserta Program Studi Magister Hukum, NIM 17.C2.0003

Menyatakan:

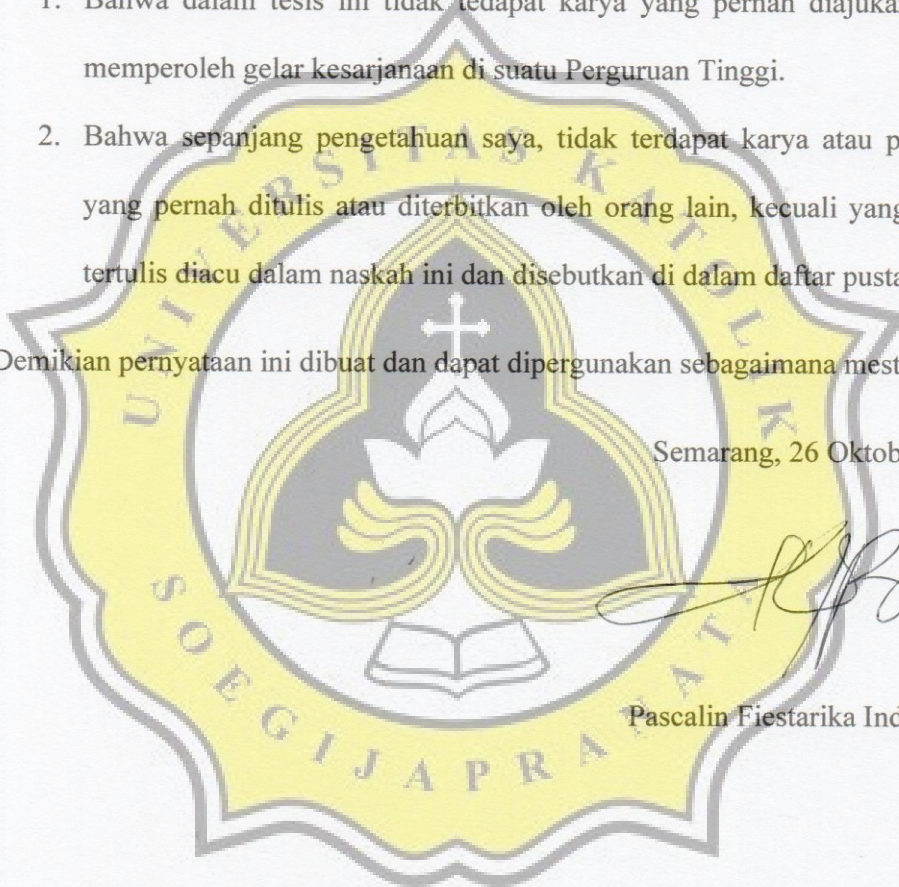
1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Oktober 2020



Pascalin Fiestarika Indraswari



## ABSTRAK

Peningkatan jumlah pelayanan kesgilut di kota Semarang setiap tahunnya sebanding dengan potensi peningkatan produksi limbah medis. Limbah medis yang tidak dikelola dengan benar akan membahayakan kesehatan pasien, tenaga medis dan juga lingkungan hidup. Oleh karena itu, peran Pemerintah Kota Semarang sangat penting dalam mengatur, mengeluarkan kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap penyebaran infeksi dan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam pengelolaan limbah medis di klinik dan dokter gigi praktik mandiri serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas pengelolaan limbah medis.

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis sosiologis dan dipaparkan secara deskriptif analitis. Data primer dikumpulkan melalui studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Data hukum sekunder diperoleh penulis melalui studi pustaka dengan mengumpulkan teori hukum dan non hukum. Selain itu penulis juga mengumpulkan semua regulasi maupun kebijakan pemerintah pusat hingga daerah yang relevan dengan topik penelitian. Sampel penelitian diambil dari populasi klinik yang menjalankan pelayanan kesgilut serta dokter gigi praktik mandiri di Kota Semarang. Sampel ditentukan secara *purposive sampling*. Data penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dan dijelaskan melalui narasi analitis, grafik, serta tabel.

Kebijakan pengelolaan limbah medis Pemkot Semarang untuk klinik gigi dan dokter gigi praktik mandiri ada dalam bentuk SPO penerbitan izin operasional klinik di DPMPTSP dan SPO penerbitan surat izin praktik di DKK. Belum ada kebijakan Pemkot Semarang untuk pengelolaan limbah medis di dokter gigi praktik mandiri. Secara yuridis, isi aturan yang tumpang tindih antara KLHK dan Kemenkes dan kekosongan hukum dalam perda lingkungan terkait jenis dokumen lingkungan menjadi penghambat pelaksanaan pengelolaan limbah medis. Diskresi untuk klinik menjadi tidak tepat kaitannya dengan perizinan dan kelayakan sarpras yang belum terpenuhi. Tidak adanya kewajiban memiliki dokumen lingkungan dan dokumen kerja sama dengan pihak pengolah membuat komitmen dokter gigi rendah dalam mengelola limbah medisnya. Pemkot Semarang perlu membuat produk kebijakan seperti pedoman, surat edaran, atau surat keputusan sebagai langkah penyelesaian yang cepat dalam menyelesaikan hambatan yuridis ini. Secara sosiologis, faktor pendukung untuk klinik muncul dalam bentuk paksaan administratif perizinan yang memberi efek disiplin dalam pembaharuan kerja sama dengan pihak ketiga. Kurangnya pengetahuan sejawat akan pedoman pengelolaan limbah medis yang diterbitkan pemerintah menjadi penghambat. Faktor penghambat teknis di klinik muncul pada tahap pengangkutan oleh pihak ketiga yang melebihi batas waktu yang ditentukan. Di dokter gigi praktik mandiri, biaya kerja sama dengan pihak pengolah yang dinilai terlalu mahal menyebabkan para sejawat cenderung membuangnya bersama sampah rumah tangga.

**Kata kunci:** Kebijakan, Limbah Medis, Kesgilut, Klinik Gigi, Dokter Gigi

## **ABSTRACT**

*The number of dental clinics and dentist independent practices in Semarang city has increased every year. This also increases the potential production of the dental health care waste. Health care waste could potentially harm the health care personnel, patients, and also the environment because of their highly hazardous contained material. Therefore, Semarang City Government is responsible to regulate and making policies about it. This study will not just analyze Semarang City Government policies in managing health care waste in dental clinics and independent dentist practices, but also identify the factors that support or inhibit the implementations.*

*This research was held in Semarang City using sociological juridical approach and presented descriptively and analytically. Primary data was collected through observation and interviews. Secondary legal data is obtained by collecting legal and non-legal theories. In addition, the authors also assess all regulations and policies from central to local governments that are relevant to this topic. The research sample was taken from clinics that run dental services as well as independent dentists in Semarang city. The sample was determined by purposive sampling and analyzed qualitatively through analytical explanations, graphs and tables.*

*The policies regarding dental health care waste managements in Semarang City are found in the standard operational procedure of licensing. The procedures are held in publishing the operational license for clinics and the professional licence for dentists. From a juridical point of view, a legal vacuum regarding obligation of environmental document and overlapping guidelines in both of ministry's regulation impact both of health care facilities carry out the procedure inappositely. The local government should publish the local guidelines, form letters, or decrees as a quick alternative way to suspend those juridical inhibitions. The licensing procedures act as a sociological support factor for clinic and independent dentist practices to renew their mou with the third parties every year. The lack of knowledge about health care waste ministry's guidelines inhibit the implementations in those facilities. PDGI Semarang could take the role in educating their peers through local seminars or as a material to be discussed at their regular meeting. Technically, the absence of temporary storage and cold storage make the health care waste unsave to be kept. It is also quite expensive for dentists having cooperation personally with legal third parties. Regarding to these factors, it is wise for local government start planning to build their own hazardous waste management center.*

**Keyword:** *Policies, Health care waste, Dental service, Clinic, Dentists*